

---

---

## BELAJAR DARI DINAMIKA PARTAI POLITIK JEPANG

Subarno Wijatmadja\*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

### Abstrak

Sebagai negara industri, Jepang merupakan pelopor di kawasan Asia Timur. Jejaknya diikuti oleh Negara-Negara Industri Baru atau *Newly Industrializing Countries (NICs)*, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Namun, dalam bidang politik, negara-negara Asia Timur tidak memandang Jepang sebagai pelopor. Jepang dianggap seperti negara mereka sendiri yang mengadopsi demokratisasi setelah Perang Dunia II. Meskipun demikian, Jepang mengalami manuver politik yang juga dialami oleh negara lain, seperti Indonesia beberapa tahun kemudian. Perpecahan partai politik, pola koalisi, dominasi partai tunggal, dan lain sebagainya, terjadi baik di Jepang maupun di Indonesia. Apakah ini merupakan bentuk dari Nilai-Nilai Asia? Saya rasa tidak.

**Kata Kunci:** partai politik, jepang, koalisi

### Abstract

*As an industrialized country, Japan was pioneer in the region of East Asia. Its track has been followed by Newly Industrializing Countries (NICs), such as South Korea, China Taipei, Hongkong and Singapore. But, in political sphere, East Asian Countries don't look at Japan as pioneer. Japan has been regarded like their own countries, which adopted democratization after the World War II. Nevertheless, Japan experienced manouvres in political realm which are experienced by other country, i.e Indonesia several years later. Split off political parties, pattern of coalition, single party domination, etc, are experienced in Japan and Indonesia as well. Is it a form of Asian Values? I don't think so.*

**Keywords:** *political party, japan, coalition*

---

### PENDAHULUAN

Jepang adalah negara non-Barat pertama yang melakukan industrialisasi menjadi negara modern dan setara, melampaui negara-negara Eropa yang telah lebih dahulu melakukan industrialisasi. Bahkan ketika Jepang hancur lebur akibat Perang Dunia II, negara ini bisa bangkit dengan cepat. Tidak sampai duapuluh tahun, Jepang mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan dirinya dengan negara-negara pemenang perang. Mereka yang berhasil membangun Kembali

Jepang pasca perang adalah orang yang sama dengan mereka yang mengalami kekalahan dalam perang (Wijatmadja, 2017).

Keberhasilan Jepang menjadi negara maju tak ayal menarik perhatian masyarakat internasional. Tidak hanya negara-negara Asia yang menginginkan negerinya maju, tetapi juga negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat pun melihat Jepang sebagai fenomena unik. Di berbagai negara dikembangkan studi tentang Jepang untuk mempelajari

mengapa Jepang bisa bangkit dengan cepat setelah hancur lebur akibat kalah perang. Apapun tentang Jepang dipelajari seperti sistem sosial, bahasa, budaya, etos kerja, dan lain-lain termasuk bagaimana Jepang mengelola negaranya.

Negara-negara di Asia Timur (*North East dan South East*) yang mengalami penjajahan Jepang di paruh pertama abad XX, merasakan kenyataan bahwa Jepang jauh lebih unggul dibanding mereka. Jaringan jalan raya dan kereta api di Korea Selatan misalnya, berkembang karena dibangun tentara Jepang selama masa pendudukan. Di Jawa, para petani menanam padi secara teratur, ada pola jarak antar tanaman, yang mengajari juga tentara Jepang. Pengetahuan ini kemudian ditularkan oleh para transmigran Jawa ke Sumatra dan ke Pulau Buru oleh para tahanan politik G-30S-PKI. Begitu juga di Myanmar dan negara-negara lain, mengalami penderitaan akibat pendudukan Jepang yang memaksa rakyatnya menjadi romusha untuk proyek-proyek strategis dan infra-struktur.

Ketika negara-negara Asia Timur ini merdeka dan mulai membangun negaranya, maka mereka melihat Jepang sebagai role model pembangunan. Apakah itu dibidang pembangunan ekonomi dan industry, manufaktur dan infrastruktur lainnya. Apa yang dilalui negara-negara Asia Timur pada saat ini, Jepang telah mengalaminya beberapa dekade sebelumnya. Begitu pula fenomena dibidang politik, seperti sistem demokrasi parlementer yang diadopsi Jepang pasca perang, diadopsi juga oleh banyak negara Asia. Perkembangan politik Jepang yang kabinetnya jatuh bangun, dialami juga oleh Indonesia pasca perang. Ketika politik Jepang mulai stabil sejak 1955, Indonesia mengadopsi ide kestabilan

politik dengan menyederhanakan partai politik melalui kebijakan fusi tahun 1973. Intinya, apa yang terjadi di Jepang, akan terjadi di negara-negara Asia satu atau dua dekade setelahnya.

Demikian juga fenomena kepartaian di Jepang, secara tak sengaja mirip model perkembangan partai politik di negara lain, terutama di Indonesia. Fusi partai di Jepang, tanpa disadari terjadi di Indonesia beberapa dekade setelahnya. Munculnya partai politik setelah perang dan pemilu di Jepang, melahirkan pemerintahan koalisi yang tidak bertahan lama. Hal ini diikuti Indonesia satu dekade setelahnya. Banyak partai politik bermunculan pada pemilu 1955 dan pemerintahan yang berganti-ganti tidak bertahan lama. Fusi partai di Jepang tahun 1955 diikuti Indonesia dua dasawarsa setelahnya melalui kebijakan fusi tahun 1973 dibawah pemerintahan Orde Baru.

Fenomena ini menarik dikaji dengan asumsi di atas, apa yang terjadi di Jepang akan terjadi juga di negara-negara lain termasuk Indonesia. Meskipun hal ini tidak berlaku dalam bidang ekonomi. Reformasi Indonesia tidak membuat pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan jauh KKN-nya lebih marak dibanding era Orde Baru yang direformasi.

Untuk melihat bagaimana perkembangan politik di Indonesia masa depan, peran partai politik sangat menentukan. Bagaimana partai politik ini berkembang, atas dasar asumsi di atas, akan mengikuti jalur perkembangan partai politik di Jepang. Karena itu, perkembangan partai politik di Jepang menjadi fokus dalam penelitian ini. Bagaimana perkembangan partai politik di Jepang adalah pertanyaan yang akan dijawab. Dengan memahami perkembangan

partai politik di Jepang, akan terlihat gambaran perkembangan partai politik di Indonesia, berdasarkan pada asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam meneliti proses, metode kuantitatif tidak bisa digunakan, secara alami metode kualitatiflah yang seharusnya digunakan. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Sekalipun teknik pengumpulan data masa kini dibedakan menjadi teknik pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based research*) dan berbasis komputer (*computer-based research*), tetapi pada dasarnya itu hanyalah teknik studi kepustakaan.

Metode kualitatif menurut Denzin dan Lincoln merupakan multi metode dalam fokus kajiannya, yang melibatkan penafsiran dan pendekatan naturalistis terhadap hal yang dikaji. Lebih lanjut Denzin dan Lincoln menyatakan:

*This means that qualitative researchers study things in their natural setting, attempting to make sense of interpret phenomena in term of the meaning people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials – case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional and visual texts – that describe routine and problematic moments and meaning in individual lives (Denzin & Lincoln, 1994).*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan cara observasi, interview untuk memperoleh data primer. Sedangkan studi

pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan datanya. Sedangkan analisa data kualitatif dengan menekankan pada kasus, yakni perkembangan partai politik di Jepang dalam konteks pasca perang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik, dan melalui kekuasaan itu melakukan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 1994). Senada dengan pengertian tersebut, Ramlan Surbakti (1992) juga menyatakan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Berdasarkan dua definisi tersebut bisa dipahami bahwa partai politik merupakan organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan – terus menerus – sehingga partai politik merupakan organisasi yang terbuka di berbagai level mulai level pusat, daerah hingga ke pelosok. Cara yang digunakan partai politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum.

Partai politik mulai berkembang di Eropa ketika para ahli menyuarakan pentingnya pengaturan masyarakat ber-

dasarkan harkat dan martabatnya. Teori kedaulatan Tuhan mulai ditinggalkan, haka nak sulung raja mulai digantikan pemikiran lain tentang kebebasan manusia. Sejak abad 18 para pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu dan lain-lain, telah merumuskan pemikiran mereka tentang kekuasaan, negara dan cara bagaimana masyarakat dan negara diatur. Pemikiran ini yang kemudian dikembangkan pada masa *post-renaissance* dan orang mendirikan partai politik, kelompok kepentingan guna mewadahi tujuan dan kepentingan mereka. Ketika Eropa memasuki masa modern, partai politik juga ikut berkembang.

Di Jepang, partai politik dalam pengertian modern muncul seiring dengan Restorasi Meiji, periode ketika terjadi transformasi politik yang cepat. Dimasa itu terjadi kelonggaran politik (kebebasan), maka muncullah partai politik di Jepang, yaitu Partai Liberal (*Jiyuta*) pada tahun 1847. Partai ini mengubah namanya menjadi *Seiyukai* pada tahun 1990 dan setelah Perang Dunia II partai ini muncul kembali dengan nama Partai Liberal. Partai politik kedua di Jepang adalah *Minseito* (Partai Pemerintahan Rakyat) yang didirikan pada tahun 1882. Partai ini berganti-ganti nama menjadi Partai Progresif (*Shinpotō*), dan berganti nama lagi menjadi Partai Demokratik (*Minshutō*).

Beberapa karakteristik partai politik yang berkembang di Jepang diantaranya adalah: *Pertama*, partai politik dibentuk oleh lingkungan masyarakat Jepang. Bagaimana rakyat Jepang berperilaku berfikir dan bertindak ikut membentuk "budaya" partai politik, bagaimana nilai-nilai sosial, kultur, mitos dan kepercayaan rakyat membentuk partai juga. *Kedua*,

struktur politik yang berlaku di Jepang yaitu sistem parlementer. Bentuk pemerintahan parlementer ini mirip dengan model Westminster yang berlaku di Inggris Raya. *Ketiga*, sistem yang digunakan untuk memilih, mengisi jabatan-jabatan politik, khususnya anggota-anggota legislatif, misalnya apakah menggunakan sistem distrik atau proporsional, dan Jepang memilih untuk menggunakan sistem distrik, rakyat memilih calon, bukan partai untuk majelis rendah, tetapi untuk majelis tinggi rakyat bisa memilih calon atau bisa memilih partai (Hayes, 1995).

### **Dinamika Partai Politik di Jepang Pasca Perang**

Perkembangan partai politik di Jepang pasca perang, yakni setelah Perang Dunia II bisa diperasikan menjadi periode 1945-1955, periode 1945-1993, dan periode pasca 1993. Tahun 1945 merupakan awal periode pertama (1945-1955), dimana Asia memasuki akhir Perang Pasifik, Jepang kalah perang dan mulailah era pendudukan pasukan Sekutu atas Jepang. Masa ini ditandai dengan pembentukan Konstitusi baru tahun 1947 yang mengubah wajah politik Jepang. Menurut Konstitusi baru ini Kaisar bukan lagi pemegang kekuatan penentu kebijakan, ia hanya sebagai simbol negara, dan juga Jepang tidak bisa lagi menggunakan hak berperang (Pasal 9 Konstitusi 1947), dan pihak Sekutu menginginkan Jepang berubah wajah menjadi negara demokrasi.

Pada dekade pertama setelah perang, demokrasi parlementer Jepang ditandai dengan banyaknya partai politik (sistem multipartai). Banyak partai yang muncul pada masa ini menganut paham konservatif, mereka saling berkompetisi dengan partai-partai berpaham progresif

dalam pemilu legislatif dan akhirnya membentuk pemerintahan koalisi. Pada Pemilu Mei 1946, menghasilkan pemerintahan koalisi Liberal-Progresif. Setahun kemudian (Mei 1947), koalisi ini berubah menjadi koalisi Partai Sosialis, Partai Demokrat dan Kooperasi Nasional dibawah Katayama Tetsu dari Partai Sosialis. Tak sampai satu tahun (Maret 1948), kepemimpinan beralih ke Partai Demokrat (*Ashida*) meskipun koalisinya masih sama. Namun koalisi hanya bertahan tujuh bulan, karena pada Oktober 1948, Yoshida (Partai Liberal) dengan dukungan partai-partai minoritas berhasil menggusur Koalisi Sosialis-Demokrat-Kooperasi Nasional. Pada Pemilu Februari 1949, *Yoshida* (Liberal) berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tiga tahun kemudian, pada Oktober 1952, *Yoshida* (Liberal) berhasil memenangkan mayoritas mutlak melalui Partai Liberal dengan dukungan 51,9% suara. Dukungan mayoritas ini tidak bisa dipertahankan pada tahun 1953, sekalipun *Yoshida* masih memimpin dengan prolehan Partai Liberal sebesar 43,3%. Pada Pemilu 1954, *Hatoyama* memenangkan pertarungan meski minoritas dalam parlemen, dan empat bulan kemudian, pada Maret 1955, *Hatoyama* masih memimpin pemerintahan (Kohno, 1997).

Tahun 1955 menandai era baru dalam sejarah partai politik di Jepang. Pada tahun ini Partai LDP (*Liberal Democratic Party*) terbentuk. Partai ini merupakan gabungan dari dua partai konservatif yaitu Partai Liberal dan Partai Demokrat. Kedua partai ini memiliki suara mayoritas di parlemen, dimana pada Pemilu 1955, Partai Liberal memperoleh 112 kursi (24%) dan Partai Demokrat 185

kursi (39.6%). Dengan jumlah gabungan ini, LDP menguasai 297 kursi dari total 467 kursi di parlemen (63.3%). Partai LDP ini menjadi mayoritas sejak Pemilu 1955 dan bertahan hingga akhirnya ditumbangkan pada Pemilu 1993.

Dominasi Partai LDP di atas pentas politik Jepang selama hampir empat dasawarsa akhirnya tumbang (untuk sementara) tahun 1993. Pada tahun tersebut, LDP tidak bisa mempertahankan mayoritas mutlaknya, meskipun tetap sebagai partai dengan suara terbanyak, namun gagal memperoleh dukungan partai-partai lain untuk membentuk kabinet. Pada pemilu 1933, Partai LDP memperoleh 223 kursi dari 511 kursi parlemen yang diperebutkan. Sebetulnya secara hakikat Partai LDP tidak kalah, karena dua partai baru yakni *Shunsei-to* mendapat 55 kursi dan *Sakigake* 13 kursi, merupakan pecahan dari LDP. Jika keduanya dihitung, maka 'hakikatnya' Partai LDP memperoleh total 301 kursi (223 + 55 + 13 + 10 kursi Partai Independen *pro-LDP*). Akan tetapi dalam prakteknya *Shunsei-to* dan *Sakigake* tidak bersedia berkoalisi dengan LDP, sehingga Partai LDP gagal mempertahankan kekuasaan.

Pada pemilu 1933, kedua partai *Shunsei-to* dan *Sakigake* lebih memilih berkoalisi dengan lima partai lain untuk membentuk koalisi tujuh partai. Keputusan ini mengakhiri dominasi LDP yang telah menguasai pemerintahan sejak 1955 dan menjadikan LDP sebagai partai oposisi untuk pertama kalinya. Partai koalisi ini terdiri dari *Japan Socialist Party*, *Shinseito*, *Komeito*, *Sakigake*, *DSP* dan *JSP*. Koalisi ini dipimpin oleh *Hosokawa Marihiro* sebagai Perdana Menteri. Kemenangan atas LDP membuat kabinet ingin melakukan perubahan besar-

besaran dalam sistem politik Jepang yang meliputi reformasi sistem pemilu, undang-undang anti-korupsi, regulasi industri, perdagangan dan perbankan, dimana reformasi ini akan memperbesar kewenangan pemerintah daerah (Neary, 2002).

Akan tetapi usaha Hosokawa untuk mempertahankan koalisinya justru merugikan dirinya. Ia dipaksa mengundurkan dirinya karena “dosa kecil” dimasa lalu. Pimpinan koalisi kemudian dipegang oleh Hata Tsutomu (*Shinseito*), namun ia juga mengalami masalah dalam menjaga keutuhan koalisi, yaitu Ketika JSP (*Japan Socialist Party*) dan *Sakigake* menarik dukungan sehingga Hata Tsutomu hanya memiliki 160 kekuatan suara. Kemelut dalam koalisi ini bisa diselesaikan dengan melibatkan LDP dimana Murayama akan menjadi perdana Menteri, JSP akan mendapat jatah tiga jabatan menteri lagi, *Sakigake* akan mendapat tambahan satu Menteri dan selebihnya diserahkan pada LDP. Dengan demikian, LDP hanya berada di luar pemerintahan selama kurang dari satu tahun.

Kembalinya LDP dalam pemerintahan menguntungkan partai ini, karena dalam Pemilu 1996 partai LDP bisa menguasai 239 kursi dari 500 kursi parlemen yang diperebutkan. LDP membentuk koalisi dengan menggandeng partai-partai kecil *Sakigakae* (2 kursi) dan SDP (*Social Democrat Party*) 15 kursi, maka koalisi dengan jumlah kursi 256 kursi cukup sebagai kekuatan mayoritas di parlemen. Sementara itu Hata dan beberapa kawannya mendirikan Partai Matahari (*Taiyoto*), dan pada 1997 *Shinsito* (NFP) pecah menjadi enam partai kecil.

Meninggalnya Perdana Menteri Obuchi tahun 2000 digantikan oleh Mori Yoshiro

(Sekjen LDP). Namun Mori kurang populer di Jepang. Pada Pemilu 2000, LDP memperoleh 233 kursi dari 480 kursi yang diperebutkan, meskipun perolehan suara partai ini menurun. Begitu pula rekan koalisinya, *Komeito* menurun perolehan kursinya hingga 11 kursi, Partai Konservatif mengalami penurunan 11 kursi, dan LDP mengalami penurunan perolehan kursi sebanyak 37 kursi. Sebaliknya partai oposisi meningkat perolehan suaranya. Partai DJP dari 95 menjadi 127 kursi, Partai Liberal dari 18 menjadi 22 kursi dan Partai SDP dari 14 menjadi 19. Hanya partai JCP yang kehilangan kursi dari 26 menjadi 20 (Neary, 2002).

Memasuki abad XXI, Partai LDP dengan 232 kursi di Majelis Rendah dan 111 kursi di Majelis Tinggi menjadi partai mayoritas di majelis rendah. Meski demikian LDP masih tetap membutuhkan rekan koalisi untuk mempertahankan kedudukannya. Pada saat itu partai oposisi utama adalah DJP dengan 129 kursi di Majelis Rendah dan 58 kursi di Majelis Tinggi. DJP mengusung slogan: kedaulatan rakyat, penghormatan pada HAM dan nilai-nilai perdamaian, prinsip pasar bebas tetapi individu harus memperoleh jaminan sosial dan keamanan, serta pemerintah seharusnya transparan dan mengurangi sentralisasi.

### **Pelajaran**

Jepang lebih dahulu memulai industrialisasi dan diikuti oleh negara-negara Asia Timur. Dalam pertumbuhan ekonomi, Jepang menjadi pioneer pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur, merujuk teori *flying geese* atau formasi angsa terbang. Dalam formasi ini, Jepang berada di depan dan diikuti NICs/ Negara-Negara Industri Baru seperti

Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura. Sedangkan China pasca Perang Dunia II belum menampakkan kebangkitannya, baru pada dekade 1980an, China mulai tumbuh dengan pesat hingga menjadi kekuatan besar abad 21.

Sebagaimana diasumsikan pada bagian pendahuluan di atas, apa yang terjadi di Jepang, fenomena serupa akan terjadi di negara-negara Asia Timur (*South East and North East*) beberapa dekade berikutnya yang mengikuti pola Jepang lewat formasi angsa terbangnya. Bagaimana dengan politik? Apakah dalam kehidupan politik, termasuk partai politik, akan berlaku hal-hal seperti asumsi di atas? Dengan memperhatikan dinamika partai politik Jepang dan Indonesia bisa dikatakan bahwa pengalaman Jepang juga terjadi di Indonesia. Sekalipun demikian tidak bisa dikatakan politik Indonesia mengekor politik Jepang. Demokrasi yang dikembangkan Jepang pasca Perang Dunia II berbeda dengan yang dikembangkan di Indonesia. Beberapa kesamaan Jepang dan Indonesia, dimana Jepang lebih dulu dibanding Indonesia, diantaranya adalah: sistem multipartai, penyederhanaan partai politik, partai dominan di parlemen, hengkangnya tokoh-tokoh partai dan membentuk partai baru.

Sistem multipartai yang diterapkan di Jepang pasca Perang Dunia II adalah karena Jepang kalah perang dan Konstitusi diganti dengan yang lebih demokratis. Partai Liberal, Partai *Japan Progressive*, Partai *Japan Cooperation* dan Partai Sosialis Jepang dibentuk pada tahun 1945, disamping Partai Komunis yang telah ada sejak 1922. Partai Liberal Jepang dibentuk pada bulan November 1945 oleh para anggota *Seiyukai* (43) dan

mantan anggota *Minseitō* membentuk Partai *Japan Progressive* dengan 274 anggota di Majelis Rendah. Partai *Japan Cooperation* didirikan pada akhir 1945 dengan 23 anggota di Majelis Rendah (Neary, 2002; Kohno, 1997). Pembentukan partai ini merupakan antisipasi datangnya angin demokratisasi yang dibawa pasukan sekutu selama masa pendudukan.

Di Indonesia, begitu ada rencana Pemilu 1955 banyak partai politik bermunculan. Pada Pemilu 1955 puluhan partai politik berkontestasi untuk merebut simpati rakyat. Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu terbersih, terjurdil dan terluber sepanjang masa Indonesia merdeka. Kesamaan Indonesia dan Jepang adalah pada sistem multipartai dimana banyak partai yang ikut pemilu.

Di Jepang, sistem multipartai ini membuat kabinet sering jatuh karena mosi tidak percaya para anggota parlemen, dan ini membuat kabinet sering berganti-ganti. Dari tahun 1945-2000 saja, ada duapuluh lima perdana menteri yang rata-rata menjabat hanya dua tahun, meski ada juga yang menjabat sampai enam tahun seperti Yoshida Shigeru (1948-1954), Sato Eisaku (1964-1972), dan Nakasone Yasuhiro (1982-1987). Sementara di Indonesia juga begitu pasca kemerdekaan, dimana kabinet tidak berumur panjang dan jatuh bangun akibat mosi tidak percaya dari parlemen, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli untuk kembali ke UUD 1945.

Kestabilan politik di Jepang dicapai dengan mergernya dua partai politik besar yaitu Partai Liberal (112 kursi / 24%) dan Partai Demokrat dengan 185 kursi (39.6%) dari 467 kursi di parlemen. Merger dua partai besar tersebut menjadi Partai Liberal Demokrat (LDP). Kemena-

ngan LDP pada Pemilu 1955 dan tahun-tahun selanjutnya membuat politik Jepang lebih stabil. Pergantian perdana menteri dan pembentukan kabinet baru lebih disebabkan oleh dinamika internal partai LDP, bukan oleh tekanan partai-partai oposisi.

Di Indonesia, kestabilan politik terjadi manakala pemerintahan Orde baru membuat kebijakan fusi partai politik tahun 1973. Pada masa itu partai-partai berhaluan Islam digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai-partai nasionalis dan partai berhaluan agama lain (Kristiani) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Di luar kedua partai tersebut ada Golongan Karya yang merupakan gabungan dari faksi-faksi yang tergabung dalam SEKBERGOLKAR. Setelah fusi, dominasi Golongan Karya mengalahkan dua partai lain dengan kemenangan diatas 60% suara pemilih. Keadaan ini berlangsung dari Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997 dan berakhir pada masa reformasi.

Perpecahan partai politik di Jepang dimulai ketika faksi-faksi yang berada di dalam partai tersebut menyatakan keluar, memisahkan diri dan membentuk partai baru. Kekalahan LDP pada Pemilu 1993 sebenarnya karena ada anggotanya yang keluar dan membentuk partai baru. *Shinseito* dan *Sakigake* merupakan partai pecahan dari LDP. Ketika dua partai pecahan ini bergabung dengan koalisi non-LDP yakni JSP (Partai Sosialis Jepang) dan kawan-kawan, maka runtuhlah hegemoni LDP.

Hal yang sama terjadi pada Golkar, saat itu Wiranto, Prabowo dan Surya Paloh yang semula bernaung di Golkar tetapi kalah dalam kompetisi menjadi ketua umum partai, kemudian masing-masing mendirikan partai baru. Wiranto mem-

bentuk HANURA, Surya Paloh mendirikan Nasional Demokrat (NASDEM), dan Prabowo membidani lahirnya Partai GERINDRA. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendirikan Partai Demokrat. Partai besar lainnya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI-P (Megawati). Dari sini muncul PITA Dimiyati Hartono dan partainya Laksamana Sukardi, dan lain-lain

Para pemimpin pecahan Golkar, tiga orang yang berlatarbelakang militer yaitu Wiranto, Prabowo dan SBY pernah maju sebagai kandidat presiden RI. Hanya Surya Paloh yang tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Surya Paloh membawa partai Nasdem untuk berkoalisi dengan PDI-P untuk mendukung Joko Widodo.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa Jepang memiliki pengalaman 'lebih dulu' dibanding negara lain di Asia Timur termasuk Indonesia. Keajaiban ekonominya ditiru oleh Negara-Negara Industri Baru (NICs), dan ini tidak dipungkiri oleh siapapun. Industrialisasi dan integrasi dengan sistem ekonomi internasional yang berorientasi ekspor juga ditiru dan ternyata berhasil oleh Singapura, Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan. Indonesiapun ingin menjadi macam Asia.

Dibidang politik, Indonesia tidak menjadikan Jepang sebagai role-model. Elit-elit politik Indonesia terdidik dengan tradisi Eropa Barat dan Amerika. Namun demikian, fenomena-fenomena politik yang terjadi di Jepang, beberapa tahun kemudian terjadi di Indonesia. Sistem multipartai di Jepang tahun 1945-

an, berlaku di Indonesia pada Pemilu 1955. Kabinet Jepang yang jatuh bangun dalam sistem multi-partai juga terjadi di Indonesia pada tahun 1950an. Dominasi satu partai di Jepang yang terjadi sejak 1955 ketika LDP berdiri dan menguasai parlemen hingga tahun 1993, hal yang sama juga terjadi di Indonesia ketika Golkar menguasai panggung politik sejak 1970an hingga reformasi 1998.

Perpecahan partai juga terjadi di Jepang dan Indonesia. Pada Pemilu 1993, *Shinseito* dan *Sakigake* tidak berkoalisi dengan partai induknya, tetapi membentuk koalisi dengan partai oposisi (JSP). Hal yang juga terjadi Ketika Gerindra justru berkoalisi dengan PDI-P pada Pemilu 2009, bukan dengan Golkar. Pada akhirnya Prabowo Subianto dikhianati oleh mitra koalisinya pada Pemilu 2014. Ia harus berhadapan dan kalah dari orang yang ditolongnya Ketika maju sebagai gubernur DKI. Partai Nasdem juga tidak berkoalisi dengan Golkar pada Pemilu 2014, dan tidak berkoalisi juga dengan sesama 'renegade'.

Banyak persamaan peristiwa politik di Jepang dan Indonesia. Karakteristik umum dari kesamaan itu adalah di Jepang terjadi lebih dulu dibanding di Indonesia. Sekalipun demikian, Indonesia tidak berkiblat ke Jepang dalam bidang politik. Kesamaan yang terjadi, apakah karena kedua negara ini menghayati Asian Values? Penulis sendiri tidak berpikir demikian.

## REFERENSI

Budiardjo, Mirriam, 1994, *Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia. Jakarta

Christensen, Ray, *Ending the LDP Hegemony*, University of Hawaii Press. Honolulu

Curtis, Gerad L., 1999, *The Logic of Japanese Politics*, Columbia University Press. Columbia

Denzin, N. and Lincoln, Y., 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publisher. CA

Hayes, Louis D., 1995, *Introduction to Japanese*, Marlowe. New York

Johnson, Stephen, 2000, *Opposition Politics in Japan : Strategies Under a One Party Dominant Region*, Routledge. London

Kohno, Masaru, 1997, *Japan's Postwar Party Politics*, Princeton UP. Princeton

Neary, Ian, 2002, *The State and Politics in Japan*, Polity. Cambridge

Surbakti, R., 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia. Jakarta

Wijatmadja, Subarno, 2017, *Studi Jepang*, JUP. Jakarta